## **PUBLIKASI PENELITIAN TERAPAN DAN KEBIJAKAN**

e-ISSN: 2621-8119 http://ejournal.sumselprov.go.id

# Analisis Kontribusi Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Palembang

## ANALYSIS OF THE CONTRIBUTION OF REGIONAL RETRIBUTION TO THE LOCALLY GENERATED REVENUE OF PALEMBANG CITY

### Rita Martini\*, Septian Bagus Pambudi, M. Husni Mubarok

Jurusan Akuntansi, Politeknik Negeri Sriwijaya

\*Korespondensi Penulis: ritamartini@polsri.ac.id

#### **ABSTRAK**

This study aims to determine the contribution of regional retribution to the Locally Generated Revenue (LGR) and achievement the target of each regional retribution type. Contribution ratio analysis is used to determine the amount of contribution of regional retribution to LGR. The conclusions obtained, the local retribution in Palembang which is carried out according to regional regulations has decreased the realization every year, while the effectiveness level has fluctuated. Local retribution has not contributed to an increase each year, because of changes in the object of retribution, lack of socialization on Regional Regulations, and the existence of new types of retribution that has been applied. Specific Licensing Services retribution contributed the most to LGR compared to other types of retribution.

**Keywords**: Contribution, Regional Retribution, Locally Generated Revenue

#### ABSTRAK

Kajian ini bertujuan mengetahui kontribusi retribusi daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta capaian target setiap jenis retribusi daerah. Analisis rasio kontribusi digunakan untuk mengetahui besarnya kontribusi retribusi daerah terhadap PAD. Kesimpulan, setiap tahun terjadi penurunan kontribusi retribusi daerah kota Palembang, sedangkan tingkat efektifitasnya mengalami fluktuasi. Kontribusi retribusi daerah belum meningkat setiap tahunnya, karena adanya perubahan objek retribusi, kurangnya sosialisasi atas peraturan daerah, dan adanya jenis retribusi daerah yang baru diterapkan. Kontribusi retribusi jasa perizinan tertentu terbesar dibandingkan jenis retribusi lainnya.

Kata kunci:Kontribusi, Retribusi Daerah, Pendapatan Asli Daerah.

#### **PENDAHULUAN**

Daerah otonom memiliki kewenangan dan kemampuan menggali sumber-sumber keuangan sendiri, ketergantungan bantuan pemerintah pusat harus seminimal PAD menjadi bagian sumber mungkin. didukung keuangan terbesar yang kebijakan pembagian keuangan pusat dan daerah mengacu pada sistem pemerintahan negara. Konsekuensinya setiap daerah dituntut meningkatkan PAD guna membiayai urusan rumah tangganya. Upaya ini ditujukan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dalam menciptakan tata pemerintahan yang lebih baik (Martini, dkk., 2019).

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) menyatakan PAD merupakan penerimaan daerah yang berasal dari berbagai sumber ekonomi asli daerah, maka diharapkan setiap pemerintah daerah dapat membangun infrastruktur ekonomi baik di daerahnya masing-masing guna meningkatkan pendapatannya. PAD adalah penerimaan hasil dari setoran pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lainn PAD yang sah.

Perlu dilakukan upaya meningkatkan PAD, vang salah satunya bersumber dari retribusi daerah (Sari 2010); (Masruri and Muazansvah 2017); dan (Martini, dkk., 2019). Retribusi Daerah menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 (Presiden 2009) tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan pribadi atau badan. Seperti tertuang di dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, Retribusi Daerah dibagi menjadi 3 (tiga) jenis, yaitu (a) Retribusi Jasa Umum, (b) Retribusi Jasa Usaha, dan (c) Retribusi Perizinan Tertentu. Pemerintah daerah berdasarkan peraturan yang berlaku memungut sejumlah dana atas kontra prestasi yang diberikan. Pembayaran tersebut didasarkan atas prestasi atau pelayanan yang diberikan oleh pemerintah daerah yang langsung dinikmati secara perorangan oleh warga masyarakat.

Palembang merupakan ibu kota Propinsi Sumatera Selatan dengan batas wilayah di sebelah utara, timur dan barat dengan Kabupaten Banyuasin; sedangkan sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Muara Enim. Palembang terletak antara 2° 52′ sampai 3° 5′ Lintang Selatan dan 104° 37′ sampai 104° 52′ Bujur Timur. Ketinggian dari permukaan air laut rata-rata 8 meter. Wilayahnya seluas 400,61 km², secara administrasi terbagi atas 16 kecamatan dan 107 kelurahan.

Retribusi daerah Palembang selama lima tahun diperoleh dari Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang. Data menunjukkan dari tahun 2013 hingga 2017 penerimaan retribusi daerah tidak mencapai target yang diinginkan. Masih kurangnya kontribusi retribusi daerah dalam kelangsungan pelaksanaan pembangunan yang terangkum dalam dana perimbangan sehingga dianggap tidak cukup menopang pendapatan daerah.

Kaitan antara besar pengaruh kontribusi penerimaan retribusi dengan pendapatan daerah karena retribusi merupakan salah satu unsur terbesar dalam menghasilkan PAD (Martini, dkk., 2019). Fenomena di atas menimbulkan permasalahan yaitu 1) bagaimana kontribusi retribusi daerah terhadap penerimaan PAD kota Palembang; dan 2) bagaimana efektivitas penerimaan retribusi daerah kota Palembang.

Dengan melihat fenomena fluktuasi berbagai komponen retribusi daerah selama kurun waktu 2013-2017, maka penulis meneliti seberapa besar kontribusi dan efektifitas retribusi daerah terhadap PAD kota Palembang.

Beberapa penelitian berkaitan dengan pendapatan daerah, khususnya pengaruh kontribusi penerimaan retribusi dengan PAD (Sari 2010); (Masruri and Muazansyah 2017); dan (Martini, dkk., 2019). Penelitian ini difokuskan pada pengaruh kontribusi retribusi daerah terhadap PAD pemerintah kota Palembang dalam periode 2013-2017.

#### METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif, dimana penelitian ini menganalisis data dengan mendeskripsikan atau menggambarkan data dengan apa adanya mengenai kontribusi retribusi daerah terhadap PAD kota Palembang periode 2013-2017. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif, dimana hasil hasil analisis yang diperoleh akan menjelaskan bagaimana efektivitas dari komponen-komponen retribusi daerah, dan berapa kontribusinya terhadap penerimaan PAD kota Palembang. Data akan disajikan dengan menggunakan statistik deskrptif melalui pengujian menggunakan teknik atau metode wawancara dan studi literatur.

Pembahasan dalam tulisan ini mencakup batasan lokasi pada kantor Pendapatan Daerah Kota Palembang. Data sekunder yang diperoleh berupa daftar realisasi penerimaan kota Palembang. Selanjutnya, dilakukan analisis untuk mengetahui seberapa besar kontribusi yang dapat disumbangkan dari penerimaan retribusi daerah terhadap penerimaan PAD. Untuk itu dilakukan perbandingan antara kedua komponen tersebut. Kontribusi dihitung dengan formula (Halim & Kusufi, 2012) berikut:

$$= \frac{realisasi Penerimaan Retribusi}{Realisasi Penerimaan Pajak Daerah/PAD} x 100\%$$
 (1)

#### HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam kurung waktu 2013 sampai 2017 ada beberapa perubahan yang dilakukan oleh kota Palembang pada objek retribusi daerah. Beberapa objek retribusi daerah yang dihapus maupun diganti namanya. Penghapusan dan penggantian nama objek retribusi daerah ini dilakukan mengacu rancangan undangundang pajak dan retribusi daerah. Ketentuan ini ditetapkan supaya iklim investasi dapat berkembang. Gambaran secara rinci disajikan pada tabel di Lampiran.

#### Kontribusi Retribusi Jasa Umum

Penerimaan PAD dari retribusi jasa umum cenderung menurun dari tahun ke tahun. Rata-rata kontribusi jasa umum dari tahun 2013-2017 adalah 2,68%. Kontribusi retribusi jasa umum terhadap PAD kota Palembang tergolong dalam kategori sangat kurang (Sari, 2010). Kurangnya penerimaan PAD dari retribusi jasa umum ini bisa disebabkan karena kurang tepatnya penetapan tarif retribusi, kurang efektifnya pemungutan retribusi oleh pemerintah daerah, kurang tepat

dalam memilih pihak ke tiga dalam membantu memungut retribusi sehingga seringkali terjadi retribusi tidak disetor kepada pemerintah daerah.

Contohnya, di kota Palembang banyak sekali terdapat lahan parkir di tepi jalan umum, tetapi penerimaan retribusinya masih kurang. Padahal retribusi penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum merupakan objek retribusi dengan target penerimaan terbesar. Data Kontribusi retribusi jasa umum terhadap PAD (Tabel 1).

Tabel 1. Kontribusi Retribusi Jasa Umum bagi PAD

Tahun	Retribusi Jasa Umum (Rp)	PAD (Rp)	Kontrib usi (%)
2013	21.618.981.038,00	521.877.454.519,12	4,14
2014	17.166.553.570,03	689.103.604.093,88	2,49
2015	17.462.295.044,34	728.123.306.512,64	2,40
2016	17.679.904.573,36	734.820.204.068,92	2,41
2017	15.547.173.209,00	777.394.030.094,98	2,00

Sumber: Data olahan

#### Kontribusi Retribusi Jasa Usaha

Data kontribusi retribusi jasa usaha terhadap PAD tahun 2013-2017 (Tabel 2).

**Tabel 2.** Kontribusi Retribusi Jasa Usaha Berkontribusi terhadap PAD

Tahun	Retribusi Jasa Umum (Rp)	PAD (Rp)	Kontribus i (%)
2013	5.700.605.981, 16	521.877.454.519,12	1,09
2014	6.305.872.529, 54	689.103.604.093,88	0,92
2015	6.747.406.933, 00	728.123.306.512,64	0,93
2016	7.172.388.988, 00	734.820.204.068,92	0,98
2017	7.032.557.645, 00	777.394.030.094,98	0,90

Sumber: Data olahan

Persentase kontribusi jasa usaha terhadap PAD kota Palembang terkategori sangat kurang (Sari, 2010). Kontribusi retribusi jasa usaha paling tinggi di tahun 2013 adalah 1,09% dan terendah terjadi di 2017 sejumlah 0,90%.

#### Determinan Penerimaan Retribusi Daerah

Penerimaan retribusi daerah Palembang masih kurang efektif. Dalam kurun waktu 2013-2017 penerimaan retribusi daerah mengalami penurunan yang signifikan dan kontribusinya terhadap PAD sangatlah kurang. Dari hasil observasi di lapangan dan wawancara, serta dikaitkan dengan hasil penelitian, didapatkan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi penerimaan retribusi daerah kota Palembang adalah: 1) inflasi, 2) fasilitas dan pelayanan objek retribusi (rumahsakit, puskesmas, terminal, pelabuhan dan yang lainnya), 3) jumlah kendaraan bermotor, 4) kebijakan otonomi daerah, dan 5) jumlah penduduk.

Tingkat inflasi berpengaruh signifikan dan berkontribusi positif dengan penerimaan retribusi daerah. Ini mengindikasikan bahwa peningkatan tingkat inflasi akan meningkatkan penerimaan retribusi daerah dan begitu pula sebaliknya. Pertumbuhan tingkat inflasi di kota Palembang selalu fluktuatif (Badan Pusat Statistik, 2017), sehingga berpengaruh terhadap perekonomian kota Palembang. Pemerintah kota Palembang juga harus menyesuaikan target yang ditetapkan agar dapat disesuaikan dengan kebutuhan dalam pengelolaan keuangan daerahnya terutama atas belanja rutin dan biaya pembangunan. Pemerintah kota Palembang melakukan peningkatan tarif retribusi yang ada dan disesuaikan dengan harga pasar dievaluasi dan diawasi secara rutin. Inflasi tidak mengurangi aktivitas perekonomian masyarakat. Masyarakat tetap menggunakan obyek retribusi yang ada sebagai penunjang aktivitas perekonomian mereka. Sebagaimana diketahui pendapatan per kapita di kota Palembang perkembangannya selalu mengalami peningkatan (Badan Pusat Statistik, 2017).

Jumlah fasilitas objek retribusi daerah seperti rumah sakit, puskesmas, terminal, pelabuhan dan yang lainnya berpengaruh dan berhubungan positif dengan penerimaan retribusi daerah. Jumlah rumah sakit, puskesmas, pelabuhan dan fasilitas umum lainnya sangat menunjang penerimaan retribusi daerah. Kebutuhan akan pelayanan kesehatan dan transportasi di kota Palembang cukup tinggi. Kenyataan ini berdampak pada potensi optimalisasi penyediaan fasilitas dan pelayanan kesehatan dan transportasi umum dan juga dalam peningkatan penerimaan retribusi daerah (Badan Pusat Statistik, 2017). satu penyebab adalah tingginya pertumbuhan penduduk di kota Palembang. Populasi penduduk berdampak pada tingginya kebutuhan akan penggunaan fasilitas dan pelayanan kesehatan, serta transportasi umum di kota Palembang.

Penerimaan retribusi daerah dipengaruhi oleh perubahan jumlah kendaran bermotor. Penyumbang terbesar penerimaan umum dari retribusi retribusi jasa kendaraan dan retribusi parkir. Kedua retribusi itu menggunakan kendaraan bermotor sebagai subyek dari retribusinya. Peningkatan kuantitas kendaraan bermotor akan meningkatkan mobilitas penduduk dalam melakukan aktivitas perekonomiannya sehingga dibutuhkan peningkatan pelayanan dan infrastruktur jasa (Viva Sumsel.com-Palembang, 2016). Kondisi ini memberikan indikasi bagi pemerintah kota Palembang untuk menggali potensi dari peningkatan jumlah kendaraan bermotor. Dengan semakin bertambahnya jumlah kendaraan bermotor dapat dijadikan pemacu bagi pemerintahan kota Palembang untuk meningkatkan kualitas dan pelayanan masyarakat terutama bagi ketersediaan obyek retribusi yang ada, sehingga penerimaan retribusi dapat dioptimalkan (Republika.co.id, 2017), dan (Badan Pusat Statistik, 2017).

Kebijakan otonomi daerah berpengaruh berhubungan negatif penerimaan retribusi daerah. Ini menunjukkan dengan adanya kebijakan otonomi daerah justru menurunkan penerimaan retribusi daerah. Kebijakan otonomi daerah membutuhkan kesiapan yang handal dari pemerintahan daerah di dalam pengelolaan keuangan daerahnya. Suatu daerah tidak akan berhasil meningkatkan penerimaan keuangan daerahnya, apabila tidak sigap dan cermat dalam menyikapi kebijakan otonomi daerah, terutama menyangkut efektivitas dan efisiensi pengelolaan keuangan daerah (Martini, dkk., 2019); (Martini, dkk., 2015) Pemerintah kota Palembang dalam mengelola keuangan daerah pada masa otonomi daerah masih belum maksimal terutama menyangkut penerimaan dari retribusi daerah. Kenyataan tersebut ditunjukan pula oleh target dan realisasi penerimaan retribusi yang trendnya dari tahun 2013 hingga 2017 cenderung mengalami penurunan. Ini mengindikasikan pelaksanaan otonomi daerah belum berhasil memberikan dampak yang postif bagi perkembangan penerimaan retribusi daerah. Pemerintah kota Palembang juga kurang mensosialisasikan peraturan daerah (Perda) yang Kurangnya pengetahuan wajib retribusi akan tersebut. peraturan akan menyebabkan kurangnya penerimaan retribusi daerah di kota Palembang.

Pemerintah kota Palembang masih kurang optimal dalam melakukan self regular power dan managing financial power. Kondisi ini bermakna (Masruri and Muazansyah, 2017), kemampuan mengatur dan melaksanakan otonomi daerah (Martini, Agustin, & Sari, 2020) demi kepentingan masyarakat didaerahnya, serta kemampuan mengembangkan kompetensi dalam mengelola secara optimal sumber penghasilan dan keuangan guna pembiayaan aktivitas

pemerintah, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat. Masih rendahnya efektivitas penerimaan jenis retribusi, antara lain retribusi uji kendaraan, retribusi rekreasi, retribusi terminal, retribusi penyediaan pelayanan parkir, retribusi penyedotan kakus, retribusi pelayanan penyeberangan orang/barang, dan retribusi izin mendirikan bangunan. Penetapan target dari retribusi ini tidak disesuaikan dengan realisasi potensi yang ada di masyarakat.

Jumlah penduduk berhubungan positif namun tidak tidak signifikan pengaruhnya terhadap penerimaan retribusi daerah. Populasi yang tinggi tidak menjamin akan peningkatan penerimaan terhadap retribusi daerah. Pungutan retribusi tidak ditentukan secara langsung oleh penduduk. Retribusi disesuaikan populasi dengan standar konsumsi yang ada seperti standar dalam penggunaan ketersediaan obyek dan fasilitas retribusi. Standar ini disesuaikan kesejahteraan tingkatannya dengan yang berbeda-beda dari masing-masing penduduk (Badan Pusat Statistik, 2017).

#### KESIMPULAN

Kontribusi terbesar dari retribusi daerah untuk PAD selama 2013-2017 berasal dari retribusi jasa perizinan tertentu dengan rata-rata sebesar 10,18% masuk ke dalam kriteria kurang. Sedangkan retribusi jasa usaha dengan rara-rata 0,96 dan retribusi jasa umum sebesar 2,68% masing-masing masuk ke dalam kategori sangat kurang.

Tingkat efektivitas penerimaan per jenis retribusi daerah kota Palembang tergolong kurang, karena penerimaan retribusi daerah dalam periode 2013-2017 berfluktuatif dan cenderung menurun dari tahun ke tahun. Penerimaan retribusi daerah kota Palembang dipengaruhi oleh tingkat inflasi, fasilitas dan pelayanan retribusi, jumlah kendaraan bermotor, jumlah penduduk, dan kebijakan otonomi daerah.

#### **SARAN**

Pemerintah kota Palembang diharapkan meningkatkan pengkajian terhadap peraturan daerah tentang retribusi daerah diberbagai sektor.

Pemerintah kota Palembang perlu melakukan intensifikasi (dengan meningkatkan pelayanan, memberikan pelayanan kepada masyarakat, dan memberikan penyuluhan retribusi), dan ekstensifikasi (memperluas objek retribusi daerah, memperluas wajib retribusi daerah) untuk meningkatkan perolehan retribusi guna meningkatkan PAD kota Palembang.

Peneliti selanjutnya agar menganalisis tidak hanya efektivitas berdasarkan realisasi dibandingkan target, akan tetapi potensi riil dari pos penerimaan PAD.

Penelitian ini hanya menganalisis efektivitas dan kontribusi, untuk lebih baiknya dianalisis juga efisiensi, karena untuk mengetahui tingkat efisiensi pemungutan pos penerimaan PAD yang dilihat dari besar biaya untuk memungut retribusi.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Badan Pusat Statistik. 2017. *Palembang Dalam Angka 2017*.
- Halim, A., & Kusufi, M. S. (2012). *Akuntansi keuangan daerah* (Vol. 4). Jakarta: Salemba Empat.
- Martini, Rita, Resy Agustin, Zaliah Zaliah, and Hadi Winarko. 2019. "Pendapatan Asli Daerah Provinsi Sumatera Selatan: dari Kontribusi Retribusi pasar." *Jurnal Kajian Ekonomi dan Keuangan Daerah* 5 (1): 58– 71.
- Martini, Rita, Naufal Lianto, Sukmini Hartati, Zulkifli Zulkifli, and Endah Widyastuti. 2019. "Sistem Pengendalian Intern Pemerintah atas Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Dana Desa di Kecamatan Sembawa." *Jurnal Akademi Akuntansi* 2 (1): 106–23.

- Martini, R., Agustin, R., & Sari, K. R. (2020). Accrual Discretion Policy on Excess/Less Budget Financing at the Provincial Level. *TEST Engineering & Management*, 82, 9925-9935.
- Martini, Rita, Kartika Rachma Sari, Tri Somadi, and 2019. I Wayan Karman. "Financial Independence of the South Sumatra Regional Government" Proceedings International Conference On Applied Science and Technology 2019 - Social Sciences Track 2019). 354, (iCASTSS pp. 360-364. Denpasar: Atlantis Press. https://doi.org/10.2991/icastss-19.2019.75.
- Martini, Rita, Kartika Rachma Sari, and Rulyanti Susi Wardhani. 2015. "Analisis Penerapan Good University Governance Melalui Efektivitas Pengendalilan Intern Dan Komitmen Organisasional." *Simposium Nasional Akuntansi XVII*.
- Masruri, and Imam Muazansyah. 2017. "Analisis Efektifitas Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan (PNPM-MP)." *Journal of Governance and Public Policy* 4 (2). https://doi.org/10.18196/jgpp.4281.
- Presiden Republik Indonesia. 2009. "Undang Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009."
- Republika.co.id, Palembang. (2017, April 16).

  Retrieved from https://www.republika.co.id/berita/nasional/d aerah/17/04/16/ooia3x319-15-juta-wp-disumsel-menunggak-pajak-kendaraan-bermotor
- Sari, Yulia Anggara. 2010. "Analisis Efektivitas dan Kontribusi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan terhadap Pendapatan Daerah di Kota Bandung." *Jurnal Wacana Kinerja* 3 (2): 173–85.
- Viva Sumsel.com-Palembang. (2016, Januari 12). http://vivasumsel.com. http://vivasumsel.com/tahun-201 palembang-akan-dilanda-macet-

### Lampiran

Perkembangan Objek Retribusi Daerah Kota Palembang (2013-2017)

No	Retribusi Daerah	Tahun					
		2013	2014	2015	2016	2017	
Α.	Jasa Umum	4					
1	Pelayanan kesehatan	V	-	-	-	-	
2	Pelayanan penguburan/pemakaman	√	V	V	V	V	
3	Pelayanan pemeriksaan dan/atau pengujian alat pemadam kebakaran	V	√	√	√	<b>V</b>	
4	Penggantian biaya cetak penyediaan peta dasar (garis)	√	√	√	√	V	
5	Penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum	√	√	√	√	V	
6	Pengujian kendaraan bermotor	√	V	<b>√</b>	-	-	
7	PKB-mobil bus umum dan mobil tak umum	-	-	-	√	V	
8	PKB - mobil penumpang umum	-	-	-	1	V	
9	PKB - mobil barang umum dan tak umum	-	-	-	√	V	
10	PKB - mobil khusus	-	-	-	V	V	
11	PKB - kereta gandengan dan kereta tempelan	-	-	-	√	V	
12	Pengambilan/pengumpulan sampah dari sumbernya ke lokasi pembuangan sementara	V	<b>V</b>	√	V	V	
13	Penggantian biaya KTP & akta catatan sipil	√	V	-	-	-	
14	Penyediaan dan/atau penyedotan kakus	√	V	1	1	V	
15	Pengendalian pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi	√	V	√	√	V	
B. Ja	asa Usaha						
1	Pemakaian kekayaan daerah	√	V	V	-	-	
2	Pemakaian kekayaan daerah (penyewaan tanah dan bangunan)	-	-	-	1	1	
3	Pemakaian kekayaan daerah (laboratorium)	-	-	-	1	1	
4	Terminal	√	1	1	-	-	
5	Terminal - tempat parkir untuk kendaraan penumpang dan bis umum	-	-	-	V	V	
6	Terminal - tempat kegiatan usaha	-	-	-	1	1	
7	Terminal - fasilitas lainnya di lingkunagan terminal	-	-	-	<b>V</b>	1	
8	Penyebrangan di Air	√	1	1	-	-	
9	Pelayanan jasa kepelabuhan	-	-	-	1	1	
10	Pelayaanan penyebranagn orang/barang	-	-	-	<b>√</b>	√	
11	Tempat pelelangan ikan	<b>√</b>	√	1	1	√	
12	Pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dipotong	√	√	√	√	√	
C. P	erizinan Tertentu	I	I	I	<u> </u>	<u> </u>	
1	Izin mendirikan bangunan		V	V	V	V	

No	Retribusi Daerah	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
2	Pemberian izin trayek kepada orang pribadi/badan	V	$\sqrt{}$	V	$\sqrt{}$	$\sqrt{}$
3	Izin gangguan/keramaian (SITU)	1	1	1	-	-
4	Pemberiaan izin gangguan ringan	-	-	-	1	1
5	Pemberiaan izin gangguan berat	-	-	-	V	1

Sumber: Data olahan penerimaan kota Palembang tahun 2013-2017